

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, salah satu masalah pendidikan yang dihadapi Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain melalui berbagai pelatihan serta peningkatan kualifikasi guru, penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan adanya peningkatan yang merata. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu yang cukup menggembirakan bagi pendidikan. Namun, sebagian lainnya masih memprihatinkan. Singkatnya, mutu pendidikan Indonesia tidak merata (Silitonga, 2020).

Ketidakmerataan mutu pendidikan di Indonesia dapat dimaklumi mengingat dua kondisi yang tidak saling mendukung, yakni di satu pihak, kondisi geografis Indonesia sangat beragam, budaya yang beragam, luasnya wilayah Indonesia, serta kesulitan akses keluar-masuk mengingat wilayah Indonesia adalah daerah kepulauan. Di sisi lain, penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan secara sentralistis, sehingga sekolah sebagai penyelenggara pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tersebut tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat (Sentosa, 2013). Dengan demikian, sekolah kehilangan kemandirian, inisiatif, dan motivasi untuk mengembangkan serta memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

Standarisasi dan penyeragaman rencana yang terlalu terpusat dirasakan menghambat pelaksanaan pembangunan karena cenderung akan berakibat terhadap ketidaksesuaian antara rencana pusat dan kebutuhan daerah masing-masing. Di samping itu, sentralisasi pendidikan telah menghambat peran serta masyarakat, khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan

selama ini sangat minim. Partisipasi masyarakat pada umumnya selama ini lebih banyak bersifat dukungan dana, bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas). Berkaitan dengan akuntabilitas, sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu pihak utama yang berkepentingan dengan pendidikan.

Kenyataan tersebut menjelaskan perlu dilakukan upaya-upaya untuk perbaikan, salah satunya yang sekarang sedang dikembangkan adalah reorientasi penyelenggaraan pendidikan dengan melalui manajemen berbasis sekolah (*School Based Management*) (Isnanto & Yustika, 2020). Dengan demikian, kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, tanggung jawab pemerintah daerah akan meningkat, termasuk dalam manajemen pendidikan. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan agar senantiasa meningkatkan kemampuannya pada berbagai tahap pembangunan pendidikan, sejak tahap perumusan kebijakan daerah, perencanaan, pelaksanaan, sampai pemantauan atau monitoring di daerah masing-masing yang sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional yang direncanakan pemerintah.

Karena itu, urgensi dilakukan penelitian mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) agar supaya mengetahui program kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan khususnya ditingkat pendidikan dasar. Hal tersebut telah disampaikan beberapa ahli (Morgan & Stewart, 2019; Naidu & Sanford, 2016; Ozen & Yildirim, 2020; Williams, Stanny, Reid, Hill, & Rosa, 2015; Yunita, 2020; Zajda & Gamage, 2009) yang menjelaskan bahwa Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Sehingga pentingnya dalam suatu sekolah sebagai organisasi membutuhkan manajemen yang sesuai dengan

kondisi setempat dan mampu mendorong profesionalisme kepala sekolah dan guru dalam mewujudkan pendidikan.

Program kebijakan nasional yang menjadi prioritas utama pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan di pendidikan dasar adalah dengan memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan fleksibilitas/keluwesannya kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan), dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (Hermiono, 2016; Iryani, 2020; Yunita, 2020).

Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), kepala sekolah selaku pengelola lembaga pendidikan lebih leluasa menyusun dan melaksanakan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Selain itu melalui Manajemen Berbasis Sekolah kerjasama dan partisipasi masyarakat serta peran sumber daya manusia yang ada di sekolah dapat ditingkatkan, sehingga tujuan dari Manajemen Berbasis Sekolah dalam peningkatan layanan pendidikan secara demokratis, transparan dan akuntabel dapat dicapai dengan lebih efisien dan efektif sesuai tujuan pendidikan nasional.

MBS bertujuan untuk meningkatkan kinerja sekolah yang meliputi peningkatan kualitas, efektivitas, efisien, produktivitas, dan inovasi pendidikan melalui pemberian kewenangan dan tanggung jawab lebih besar kepada sekolah yang dilaksanakan dengan prinsip pengelolaan yang baik, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas (Bandur, 2012; Hermiono, 2016; Moradi, Aminbidohkti, Barzegar, & Hussin, 2013; Tasar, 2018). Peningkatan kualitas dan produktivitas dapat diperoleh antara lain melalui partisipasi orang tua dan masyarakat, pengelolaan kelas, peningkatan profesionalisme guru dan kepala sekolah. Peningkatan efektivitas dan efisiensi diperoleh dari keleluasaan yang diberikan untuk mengelola sumberdaya yang ada.

Selain dapat meningkatkan mutu pendidikan, MBS juga dapat meningkatkan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola pendidikan. Di sisi lain

Manajemen Berbasis Sekolah dapat meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama (Suryono & Raharja, 2003). Manfaat lain dari Manajemen Berbasis Sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya serta dapat meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

Penegasan tentang MBS dituangkan dalam UU Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip MBS. Selain itu MBS di semua satuan pendidikan formal semakin jelas dan tegas dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah melalui UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Otonomi Daerah. Dengan demikian terjadi pergeseran kewenangan dan keleluasaan dalam penyelenggaraan seluruh bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Dan merupakan pijakan landasan hukum untuk di terapkannya Manajemen Berbasis Sekolah.

Sebagai bentuk pengelolaan pendidikan, dalam pelaksanaannya MBS masih perlu dimantapkan dan disempurnakan secara berkesinambungan berdasarkan kelemahan dan kekurangan yang ada sehingga MBS dapat dilaksanakan dengan baik. Untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan tersebut diperlukan evaluasi terhadap MBS secara menyeluruh dari setiap komponen. Menurut (Koc & Bastas, 2019) mengungkapkan bahwa semua program perlu dievaluasi untuk menentukan apakah layanan atau intervensinya telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Demikian pula MBS yang telah dilaksanakan di sekolah perlu dievaluasi guna mengetahui tingkat kemajuan sekolah tersebut sehubungan dengan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pelaksanaan MBS. Evaluasi merupakan tahapan dalam MBS yang merupakan kegiatan penting untuk mengetahui kemajuan maupun hasil yang dicapai sekolah dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan rencana yang sudah disusun oleh

masing-masing sekolah. Untuk itu dipandang perlu bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai MBS, khususnya evaluasi MBS di SDN Kota Bekasi.

Salah satu bentuk evaluasi yang dikenal dalam kegiatan pendidikan adalah evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses deskripsi, pengumpulan data dan penyampaian informasi kepada pengambil keputusan yang akan dipakai untuk pertimbangan evaluasi (Muhammad & Rahman, 2017). Evaluasi program berfungsi sebagai pembantu, pengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut pelaksanaan program tersebut. Evaluasi program adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang suatu program, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Destrianto, 2021). Hal ini berarti bahwa evaluasi program pendidikan dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis fakta, data dan informasi untuk mengumpulkan harga nilai evaluasi merupakan bagian yang penting dalam setiap kegiatan ataupun program pendidikan, sehingga tidak ada satu kegiatan pendidikan yang dapat terlaksana dengan baik tanpa evaluasi.

Menurut Mbuik (2019) Evaluasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah, dianggap penting dengan alasan: (1) dapat mendorong kreativitas kepala sekolah untuk mengelolah sekolah menjadi lebih baik; (2) dapat lebih meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap kinerja dan keberhasilan sekolah; (3) dapat mengembangkan tugas pengelolaan sekolah tersebut menjadi tanggung jawab sekolah dan masyarakat, sesuai dengan paradigma baru tentang signifikansi keterlibatan masyarakat dalam pendidikan; (4) pembuatan keputusan dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan sekolah dapat dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Ini berarti sekolah diberi keleluasaan untuk mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar, dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan prioritas sekolah, sehingga diharapkan dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan warga sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Ada beberapa strategi dalam mencapai keberhasilan Evaluasi pelaksanaan MBS, strategi-strategi tersebut yaitu: 1). Sekolah harus memiliki

otonomi terhadap empat hal, yaitu dimilikinya kekuasaan dan kewenangan, pengembangan pengetahuan yang berkesinambungan, akses informasi kesegala bagian dan pemberian penghargaan kepada setiap orang yang berhasil; 2). Adanya peran serta masyarakat secara aktif dalam hal pembiayaan, proses pengambilan keputusan terhadap kurikulum dan instruksional serta non-instruksional; 3). Adanya kepemimpinan kepala sekolah yang mampu menggerakkan dan mendayagunakan setiap sumber daya sekolah secara efektif; 4). Adanya proses pengambilan keputusan yang demokratis dalam kehidupan dewan sekolah yang aktif; 5). Semua pihak harus memahami peran dan tanggungjawabnya secara sungguh-sungguh; 6). Adanya *guidelines* dari departemen terkait, sehingga mampu mendorong proses pendidikan di sekolah secara efisien dan efektif. *Guidelines* itu jangan sampai berupa peraturan-peraturan yang mengekang dan membelenggu sekolah; 7). Sekolah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang minimal diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. 8). Penerapan MBS harus diarahkan untuk pencapaian kinerja sekolah dan lebih khusus lagi adalah meningkatkan pencapaian hasil belajar peserta didik; 9). Implementasi diawali dengan sosialisasi dari konsep MBS, identifikasi peran masing-masing, mengadakan pelatihan-pelatihan terhadap peran barunya, implementasi pada proses pembelajaran, evaluasi atas pelaksanaan di lapangan dan dilakukan perbaikan-perbaikan (Mulyasa, 2014).

Keefektifan Manajemen Berbasis Sekolah harus sejak awal diketahui dampaknya terhadap pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam realisasi program Sekolah sehingga dapat diketahui kelemahan untuk diperbaiki dan kekuatan untuk dipertahankan. Kriteria keefektifan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah perlu melihat sekolah sebagai suatu sistem yang terdiri dari input-proses-output. Untuk mengukur kualitas dari program yang sedang berjalan dilakukan proses evaluasi (Mulyasa, 2021). Agar dapat mengukur kualitas dari suatu program yang sedang berjalan dilakukan proses evaluasi. Proses evaluasi dilakukan agar dapat melihat suatu proses berdasarkan teori sistem adalah model evaluasi dari Stufflebeam dan Guba yaitu *context, input, process and product* (CIPP) (Stufflebeam & Coryn, 2014; Mahmudi, 2011).

Melalui evaluasi akan diketahui apa yang berjalan, apa yang tidak berjalan atau gagal, apa yang harus dirubah dan apa yang bisa dipertahankan.

Dengan demikian, bagi sekolah yang menerapkan MBS perlu memahami berbagai karakter tentang pelaksanaan MBS agar peningkatan mutu pendidikan melalui MBS dapat tercapai. Menguraikan karakteristik MBS melalui pendekatan sistem, yaitu melihat Sekolah sebagai sebuah sistem yang terdiri dari input, proses dan output/produk Sekolah. Menurut Salamah (2017) karakter input Sekolah dalam pelaksanaan MBS adalah: 1) Sekolah memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas; 2) tersedianya sumber daya yang siap melaksanakan tugas dengan efektif; dan 3) memiliki harapan prestasi yang tinggi. Karakter proses dalam melaksanakan MBS adalah: 1) pembelajaran yang efektif; 2) kepemimpinan Sekolah yang kuat; 3) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; 4) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif; 5) adanya budaya mutu warga Sekolah; 6) partisipasi warga Sekolah tinggi; 7) transparansi dan akuntabilitas manajemen; dan 8) evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Karakter output atau produk Sekolah dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah tingginya prestasi akademik dan non akademik peserta didik.

Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di Kota Bekasi memiliki karakteristik spesifik yang membedakannya dari kota-kota lain di Indonesia. Sebagai kota penyangga ibu kota, Bekasi menghadapi tantangan unik seperti urbanisasi yang pesat, tingginya mobilitas penduduk, serta keberagaman sosial-budaya yang kompleks. Hal ini berdampak pada kebutuhan sekolah untuk mengakomodasi berbagai latar belakang sosial ekonomi dan budaya siswa. Dengan sumber daya yang bervariasi, penerapan MBS di Bekasi sering kali dipengaruhi oleh perbedaan kualitas antara sekolah di kawasan perkotaan dan pinggiran. Sekolah di wilayah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan fasilitas pendidikan, sementara sekolah di wilayah pinggiran menghadapi keterbatasan infrastruktur dan dukungan dari masyarakat lokal.

Selain itu, pelaksanaan MBS di Kota Bekasi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat yang heterogen. Beragamnya tingkat partisipasi orang

tua, komite sekolah, dan pemerintah daerah memberikan tantangan tersendiri dalam menyelaraskan visi dan misi sekolah. Di sisi lain, dukungan pemerintah daerah melalui program pendidikan berbasis teknologi dan pelatihan untuk kepala sekolah dan guru telah membantu mendorong implementasi MBS yang lebih efektif. Namun, kendala birokrasi dan kesenjangan sumber daya antar sekolah masih menjadi hambatan yang perlu diatasi untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Bekasi.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 20 & 27 Oktober, 3 November 2020 di beberapa Sekolah Dasar Negeri, diketahui bahwa pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan menghadapi berbagai hambatan, bahkan kegagalan di antaranya: 1) belum semua pihak bersedia terlibat langsung dalam program Sekolah dengan berbagai sebab; 2) kinerja warga Sekolah yang tidak merata sehingga menimbulkan kecemburuan antar warga sekolah; 3) meningkatnya kebutuhan pengembangan staf yang berimbas pada peningkatan biaya pendidikan; 4) terjadinya kebingungan karena beban tugas dan tanggungjawab baru, tugas guru tidak semata-mata mengajar, tetapi juga harus mewujudkan suasana belajar yang kondusif dan mencapai mutu pendidikan; 5) akuntabilitas dan transparansi sulit diwujudkan karena transparansi masih diartikan sebagai proses penyajian bukti-bukti transaksi bukan pada pertanggungjawaban pengambilan keputusan dalam menetapkan anggaran; 6) kepala Sekolah terlalu dominan dalam pengambilan keputusan, belum memberdayakan warga Sekolah lain dalam pelaksanaan program-program Sekolah; 7) kepala Sekolah disibukkan dalam hal administrasi dan tidak memperhatikan kualitas pembelajaran guru, kurang melakukan supervisi akademis pada guru; dan 8) partisipasi orang tua peserta didik sering diartikan dengan penggalangan dana, orang tua peserta didik terlalu percaya pada Sekolah dan belum terlibat pada upaya-upaya peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung (W1.KS.05/03/2023).

Walaupun pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah pada enam Sekolah Dasar di Kota Bekasi tersebut sudah dijalankan dengan baik, namun perlu dilakukan penelitian untuk mengeksplorasi dan menganalisis

secara mendalam tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengembangkan pendidikan yang mandiri dan inovatif yang dilakukan secara berkelanjutan di sekolah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, baik secara teoritis, yuridis dan maupun praktis untuk itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **Evaluasi Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah Di SDN Kota Bekasi.**

B. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, pembatasan masalah dalam penelitian ini yaitu Evaluasi Pelaksanaan Program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi. Dari pembatasan penelitian tersebut secara konseptual ditentukan sub fokus penelitian yaitu, sebagai berikut: 1). Latar belakang program, tujuan program, dan kebijakan program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 2) Input pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum dan pembiayaan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 3) Proses implementasi dan strategi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 4) Ketercapaian hasil/*Output* Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah pada penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis konteks (*context*) mencakup tujuan program, kebijakan pemerintah, dan latar belakang program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi?
2. Bagaimana kajian masukan (*input*) mencakup pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum dan pembiayaan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi?
3. Bagaimanakah penelaahan proses (*process*) mencakup implementasi dan strategi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi?

4. Bagaimanakah penilaian produk (*product*) mencakup ketercapaian hasil pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi. Kemudian secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang evaluasi konteks (*context*) mencakup tujuan program, kebijakan pemerintah, dan latar belakang program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi.
2. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang evaluasi masukan (*input*) pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, sarana prasarana, kurikulum dan pembiayaan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi.
3. Untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam tentang evaluasi proses (*process*) mencakup implementasi dan strategi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi.
4. Untuk menganalisis secara mendalam tentang evaluasi produk (*product*) dan model evaluasi pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi.

E. Signifikansi Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Kepala sekolah, guru, komite sekolah diharapkan menjadi bahan masukan dan evaluasi yang membangun dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah;
2. Bagi Dinas Pendidikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam kegiatan evaluasi dan pengambilan kebijakan lebih lanjut dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi;

3. Bagi masyarakat, diharapkan dapat mendukung sarana prasarana sekolah serta menciptakan suasana lingkungan yang kondusif dan nyaman untuk mendukung pembelajaran yang optimal.

F. Kebaruan Penelitian (*State Of The Art*)

Penelitian tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah sudah banyak dilakukan di beberapa disiplin ilmu baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan para peneliti lainnya sehingga diperlukan untuk menganalisis penelitian terdahulu agar dapat memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Selain dari hal tersebut, penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai referensi guna menentukan dan menjelaskan pembeda dengan penelitian yang dilakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya yaitu yang dilakukan oleh: (Margaretha, Pail, Tampubolon, & Sihotang, 2020), (Retnaningsih & Santosa, 2020), (Isnanto & Yustika, 2020), (Aziz, 2018), (Rini, Sukanto, Ridwan, & Hariri, 2020). (Koc & Bastas, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Margaretha et al., 2020), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Santo Antonius I Bidaracina sudah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Pelaksanaan MBS di SD Santo Antonius I berdasarkan prinsip-prinsip pelaksanaan MBS yang berdampak pada output yang dihasilkan sekolah. Kemudian selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Retnaningsih & Santosa, 2020), dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan MBS cukup berhasil; Hal ini ditunjukkan dengan adanya perubahan yang signifikan di sekolah, yaitu peningkatan kualitas sekolah dan peningkatan minat masyarakat terhadap SD Muhammadiyah Mutihan. Dalam pelaksanaan MBS, sekolah lebih fleksibel karena dapat mengelola sekolah secara mandiri, membuat program berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sekolah. Partisipasi masyarakat cukup baik; masyarakat selalu mendukung dan membantu kegiatan sekolah dan mengontrol sekolah. Faktor pendukung dalam pelaksanaan MBS adalah masyarakat, alumni, yayasan, dan sponsor. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan lahan, sekolah tidak dapat menyediakan lapangan olahraga untuk siswa dan keterbatasan kemampuan untuk mendampingi guru.

Menurut Isnanto & Yustika (2020) bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui lebih jauh mengenai pemahaman warga sekolah tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dinamika implementasi MBS, karakteristik MBS dan tindak lanjut program MBS untuk anak usia 6-8 Tahun. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian yaitu MIT Al-Ishlah sudah memahami konsep MBS dari adanya keterbukaan dan kemampuan sekolah dalam merumuskan program-program sekolah yaitu program puncak tema belajar kontekstual, program madrasah guru, program gerakan untuk orang tua, program gemayur. Sekolah melakukan tindak lanjut dimulai dari evaluasi program yang memberatkan anak, ketertiban anak, efektivitas pembelajaran, dan program lainnya yang tidak berjalan dengan baik.

Penelitian Aziz (2018) hasil menunjukkan bahwa Madrasah dihadapkan pada posisi yang dilematis sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan semestinya Madrasah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan madrasah, terlebih saat ini adalah era otonomi daerah. Pada era otonomi saat ini salah satu konsep yang dapat diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan Manajemen berbasis sekolah. MBS merupakan strategi untuk mewujudkan sekolah menjadi lebih bermutu dengan memberikan wewenang yang luas kepada Madrasah. Walaupun Madrasah berada di bawah naungan Departemen Agama namun konsep MBS tetap dapat diimplementasikan berdasarkan atas kesesuaian MBS sebagai strategi mengatasi masalah Madrasah. Pengimplementasian Manajemen Berbasis Madrasah dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rini et al., 2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya kendala yang dihadapi antara lain kurangnya partisipasi orang tua, lemahnya *selfgoverning*, hambatan koordinasi, tumpang tindih peran kepala sekolah dan komite sekolah, lemahnya pemimpin sekolah dan peningkatan profesional, kendala peralatan sekolah, kendala pemahaman MBS, keuangan sekolah yang tidak memadai. Strategi atau

kreativitas yang digunakan dalam menyelesaikan masalah meliputi: mencari saran dan dukungan dari pemangku kepentingan sekolah lainnya, kepala sekolah dan staf mendiskusikan dan menyepakati strategi untuk menerapkan perubahan secara kolaboratif, kepala sekolah menganggap diri mereka sebagai anggota tim, mendelegasikan wewenang. Ada kesepakatan antara sekolah dan komite sekolah tentang pengurangan beban kerja. Penelitian yang dilakukan oleh (Koc & Bastas, 2019), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *“we conclude that teachers in project schools are satisfied with the new education model. There seems to be a total increase in teachers’ efficiency in addition to higher teacher performances, due to the teams built under the leadership of school principals”*.

Berdasarkan analisis dari beberapa penelitian pendahuluan dan penelitian yang relevan di atas, maka kebaruan (*state of the art*) dalam penelitian ini adalah: 1). Adanya evaluasi tentang bagaimana latar belakang, tujuan, sasaran, dan strategi Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 2) adanya evaluasi tentang bagaimana peran program Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 3) Adanya evaluasi tentang proses Manajemen Berbasis Sekolah di SDN Kota Bekasi; 4). Adanya evaluasi tentang ketercapaian hasil pelaksanaan Manajemen Berbasis di SDN Kota Bekasi.

Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada evaluasi menyeluruh mengenai latar belakang, tujuan, sasaran, strategi, proses, dan ketercapaian hasil pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di SDN Kota Bekasi, tetapi juga pada analisis mendalam tentang bagaimana faktor internal dan eksternal memengaruhi keberhasilan implementasi MBS. Penelitian ini akan menggali secara spesifik peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini. Fokus tambahan diberikan pada bagaimana dinamika hubungan antar pemangku kepentingan mempengaruhi efektivitas manajemen berbasis sekolah, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya.

Disamping itu diperoleh pula informasi tentang penyempurnaan pelaksanaan MBS di SDN Kota Bekasi, khususnya dengan penerapan IT pada

proses manajemen sekolah tersebut. Hal inilah yang tidak ditemukan dalam penelitian sebelumnya sehingga peneliti menganggap ini sebagai kebaruan dari penelitian yang akan diperoleh. Selain dari beberapa hal tersebut bahwa adanya temuan yang belum dibahas dan adanya keterbatasan penelitian sebelumnya yang tidak banyak menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan program Manajemen Berbasis Sekolah secara mendalam, dan kemudian studi dari hasil penelitian yang relevan juga tidak banyak membahas tentang pelaksanaan evaluasi program Manajemen Berbasis Sekolah secara eksplisit. Oleh karena itu, hasil penelitian yang tidak konsisten inilah yang merupakan *gap* penelitian. *Gap* ini yang hendak ditelusuri melalui penelitian yang akan dilakukan.

